

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN
PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**(Studi di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten
Pesawaran)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

NUR INAYATUL AINAH

NPM. 1621020390

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN
PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**(Studi di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten
Pesawaran)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**NUR INAYATUL AINAH
NPM.1621020390**

Jurusan: Siyasah Syar'iiyah (Hukum Tata Negara)

Pembimbing 1: Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Pembimbing 11: Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441/2020**

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dari seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Berdasarkan pada Pasal 68 Ayat 2 huruf (e) Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan tentang kewajiban masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan di desa dan dalam Pasal 68 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakatnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana partisipasi Masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran? Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di desa Sinar Bandung kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, dan Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap partisipasi Masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data atau fakta-fakta yang ada di lapangan khususnya di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yang gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Masyarakat di Desa Sinar Bandung belum seluruhnya ikut berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 68 ayat 2 huruf (e) dan ayat 1 huruf (a) UU nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu faktornya adalah sumber daya manusia yang masih rendah

dalam Islam keterlibatan masyarakat sangat diperlukan guna untuk memajukan kesejahteraan, Yang mana telah dibicarakan didalam potongan Alqur'an dijelaskan surat *Ar-Ra'd* ayat 11, yang mana ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Di dalam *Fiqh siyasah* partisipasi masyarakat seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan umat, dalam hal ini masyarakat Desa Sinar Bandung belum secara optimal melakukan kemaslahatan dalam *fiqh siyasah*

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menyampaikan bahwa:

Nama : Nur Inayatul Ainah

TTL : Sinar Bandung, 25 Agustus 1997

NPM : 1621020390

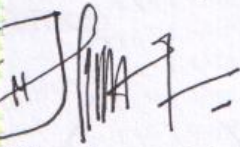
Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif *Fiqh Siyasah*** (Studi di Desa Sinar Bandung, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Maret 2020




Nur Inayatul Ainah
NPM. 1621020390



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Nur Inayatul Ainah

NPM : 1621020390

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah)

Judul : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN
PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH (Studi di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri
Katon Kabupaten Pesawaran)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas
Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP. 196603301992031002

Pembimbing II

Eko Hidayat, S.Sos., M.H.
NIP. 197512302003121002

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si
NIP. 198003122009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)”**, disusun oleh **Nur Inayatul Ainah**, NPM: **1621020390**, program studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**. Telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Muhammad Yasir Fauzi, M.H

Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H

Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A

Penguji III : Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khairuddin, M.H

NIP. 196210221993031002

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

(Q.S. Ar-Ra'd: 11)



PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur kepada Allah SWT dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita mendapatkan syafaatnya. Atas doa dan dukungan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya, oleh karena itu skripsi ini saya persembahkan:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Asep Aminulloh dan Ibuku Rostini, atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kepada ketiga adikku Dede Jaoharoh, Ahlan Islahudin dan Aqila Fariza Mufia dan kepada keluargaku dimanapun berada terimakasih atas doa dan dukungan yang telah kalian berikan.
3. Terimakasih untuk penyemangatku Adi Rustomi yang sudah selalu sabar mendampingi penulis dari tahap pertama hingga selesai.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nur Inayatul Ainah Seorang anak perempuan yang dilahirkan di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 1997 yang merupakan anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan suami istri bapak Asep Aminulloh dan Rostini. Adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. SDN 19 Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, lulus pada tahun 2010.
2. Madrasah Tsanawiyah GUPPI Trirahayu Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, lulus pada tahun 2013.
3. Madrasah Aliyah Minhaddul'ulum Trimulyo Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, lulus pada tahun 2016.
4. Pada tahun yang sam 2016 penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung program strata 1 (satu) Jurusan Hukum Tata Negara.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, taufik dan hidayahnya serta petunjuk dan limpahan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH* (studi di Desa Sinar Bandung, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran)”**. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan nikmat dan taufiknya dan semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini banyak mendapat bantuan semua pihak dalam proses penyelesaiannya. Tidak lupa diucapkan terimakasih sedalam-dalamnya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairudin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur, M.A. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis sejak awal perkuliahan dan banyak memotivasi serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, kepada perpustakaan daerah provinsi Lampung dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Kepala Desa Sinar Bandung Bapak Hasan Basri dan para aparat Desa Sinar Bandung, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, yang telah membantu penulis dalam melakukan riset atau penelitian.
9. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan perhatiannya, doa, dukungannya, serta kasih sayang dan semangat.
10. Saudara-saudariku tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepadaku.

11. Sahabat-sahabatku di UIN terkhusus Prodi Hukum Tata Negara Kelas H yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.
12. Sahabat-sahabatku Friends Until Jannah (Ambar Veronica, Sindika Adelia Hasanah, Fiky Amalia, Ade Oktaviani, Meilani Putri, Sagita Rahma Sari, Tiya Fitri Sari, Nurmala ViaTama, Sayma Ayatina).
13. Sahabat-sahabat KKN ku Kelompok 28 Desa Purbo Sembodo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

Dengan demikian mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.

Bandar lampung, 25 April 2020

Penulis

Nur Inayatul Ainah

NPM 1621020390

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah.....	9
F. Tujuan Penelitian.....	10
G. Signifikasi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori	
1. Partisipasi Masyarakat	
a. PengertianPartisipasi Masyrakat	18
b. Prinsip-prinsip Partisipasi Masyarakat.....	19
c. Unsur-unsur Partisipasi	22
d. Konsep Partisipasi Masyarakat	22
e. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat.....	25
2. Pengawasan	
a. Pengertian Pengawasan.....	27
b. Maksud dan Tujuan Pengawasan	29
c. Teknik Pengawasan.....	31
3. Partisipasi Masyarakat dalam PengawsanPengelolaan Dana Desa dalam PeraturanPerundang-undangan.....	34
4. Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan menurut Fiqh Siyasah	
a. Pengertian Fiqh Siyasah.....	37
b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	38
c. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam Fiqh Siyasah	46
d. Pembangunan dalam Islam	50

B. Tinjauan Pustaka.....	51
--------------------------	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	
1. Sejarah Singkat Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran	55
2. Kondisi Sosial Ekonomi penduduk di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran	57
3. Struktur Organisasi pemerintahan Desa di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran	59
4. Pengelolaan Dana Desa di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran	61
B. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran	67

BAB IV ANALISIS DATA

A. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran	86
B. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Fiqh Siyasah	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Rekomendasi	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Luas wilayah Desa Sinar Bandung.....	57
2. Pembagian wilayah Desa Sinar Bandung.....	58
3. Jumlah penduduk desa sinar bandung berdasarkan kelamin.....	58
4. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.....	59
5. Struktur pemerintahan Desa Sinar Bandung.....	59
6. Badan Permusyawaratan Desa.....	60
7. Lembaga Kemasyarakatan Des.....	60
8. APBDes Desa Sinar Bandung.....	61



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)”** maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahan pemahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat adalah bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan pemerintahan desa.¹ Dalam hal ini setiap warga mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam setiap perencanaan atau pengalokasian Dana Desa, dari segi pemberdayaan maupun pembangunan.
2. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan tersebut.² Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dan untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan maka perlu adanya pengawasan,

¹ Zuhraini, *Hukum pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2016), h.121.

² Nur Asyiah, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: CV budi Utama, 2012), h. 82.

dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan rencana tersebut.

3. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola.³
4. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁴
5. *Fiqh siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁵

Berdasarkan beberapa penegasan, maka yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu studi yang menggambarkan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran).

³Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 732.

⁴Visi yustisia, *pedoman resmi petunjuk pelaksanaan Dana Desa* (Jakarta: PT. visimedia Pustaka, 2016), h. 28.

⁵Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.26.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis terdorong untuk membahas masalah ini dalam bentuk karya ilmiah, antara lain:

1. Alasan Objektif

Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa serta bagaimana masyarakat di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran berpartisipasi dan mengawasi dalam setiap pengelolaan dana desa.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul Skripsi ini yaitu Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri katon Kabupaten Pesawaran) dan memiliki keterkaitan dengan program studi yang sedang ditempuh peneliti, yaitu prodi Hukum Tata Negara.
- b. Daerah penelitian sangat mudah dijangkau, sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data yang mendukung baik teori (buku-buku) atau data lapangan.

C. Latar Belakang Masalah

Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan sendiri.⁶ Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat disitu (suatu daerah) dalam hubungannya dan pengaruhnya secara timbal balik dengan

⁶Abu ahmadi, *Ilmu sosial dasar* (Jakarta:PT. Rineka cipta, cetakan kelima, 2009), h. 241.

daerah lain. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁷ Didalam desa yang berwenang adalah kepala desa dibantu perangkat desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.⁸

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, desa merupakan wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan perkembangan otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa harusnya selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi pemerintahan desa dan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BPD memiliki fungsi yang terdapat dalam Pasal 55 UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Selain dari fungsi BPD juga

⁷ Sarman, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Rineka cipta, 2011), h. 286.

⁸ Zuhraini, *Hukum pemerintahan Desa...., Ibid.*, h.131.

memiliki hak yang terdapat dalam Pasal 61 UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 61 UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa di atas, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta keterangan, seperti dalam pengelolaan Dana Desa, dalam setiap pengelolaannya harus adanya pengawasan/pemantauan seperti dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala.

Dalam Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17 Tahun 2011 tentang Alokasi Dana Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan Pertanggungjawaban penggunaan ADD setiap akhir tahun kepada masyarakat melalui BPD.

Masyarakat juga termasuk dalam konteks pengawasan dalam pengelolaan dana desa, seperti yang terdapat dalam Pasal 68 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Seperti dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dana Desa juga menyebutkan bahwa Pengawasan terhadap ADD beserta pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah dan dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pengawasan desa dilaksanakan tidak lain untuk menghindari adanya kecurangan dari pemerintah desa itu sendiri.

Masyarakat adalah unsur yang paling penting dalam berpartisipasi dan mengawasi pengelolaan dana desa, karena merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangua maupun pengembangan masyarakat pedesaan, dalam Pasal 68 ayat 1 huruf (c) UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan pada Pasal 68 ayat 2 huruf (e) UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan tentang kewajiban masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan di desa. Maka dalam partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan

masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap perogram pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat.

Di dalam Fiqh siyasah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan umat. Oleh karenanya, konsepnya dalam *fiqh siyasah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.⁹ Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pengelolaan dana desa dalam pandangan *fiqh siyasah* tidak akan berarti apa-apa.

Dalam Islam menunjukan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan maupun warna kulit. Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Allah dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingannya. Oleh karena itu, agar pengelolaan dana desa di Desa dapat dipandang sebagai ibadah, harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan bangsa (*nation building*) seperti yang telah dikemukakan di atas juga sudah dibicarakan didalam potongan Alqur'an dijelaskan surat *Ar-Ra'd* ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۖ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَالٍ ﴿١١﴾

⁹ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam(Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 31.

Artinya: *“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”*.

Dan ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi.¹⁰ Karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.

Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Lemahnya partisipasi masyarakat merupakan lemahnya praktik demokrasi ditingkat desa. Elit desa tidak mempunyai pemahaman yang memadai tentang partisipasi, bagi kepala desa partisipasi adalah bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan pemerintah desa. Pemerintah desa memobilisasi gotong royong dan swadaya masyarakat (yang keduanya dimasukan sebagai sumber penerimaan APBDes) untuk mendukung pembangunan desa.¹¹

¹⁰ Wibawa, Samudra,. *Administrasi Negara; Isu-isu Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal.7

¹¹ Zuhraini, *Hukum pemerintahan Desa...., Ibid.*, h.115.

Peran masyarakat Desa sinar bandung dalam berpartisipasi dan mengawasi pengelolaan dana desa masih terbilang kurang baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Berdasarkan pernyataan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi kasus di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran)”**.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disebutkan di atas, peneliti merasa tertarik lebih jauh tentang partisipasi Masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran). Maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi Masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Sinar Bandung kecamatan Negeri Katon kabupaten Pesawaran?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Sinar Bandung kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran?

F. Tujuan Penelitian

Sebagaimana diketahui bahwa setiap langkah dan usaha dalam bentuk apapun mempunyai suatu tujuan, begitu pula dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan di atas, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasa* terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

G. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi atau manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di fakultas Syari'ah, sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa.
 - b. Dapat dijadikan dasar bahan kajian bentuk penelitian serta lebih mendalam tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa.

2. Secara Praktis

- a. Memberi manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan disetiap perguruan tinggi Fakultas Syariah dan Hukum.
- b. Memberikan sumbang khususnya tentang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa perspektif *Fiqh Siyash* (Studi Kasus di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran).

H. Metode penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh dan membahas suatu permasalahan.¹² Dalam penelitian penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat

¹²Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 2.

data atau fakta-fakta yang ada di lapangan.¹³ khususnya di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Dalam penelitian ini dikhususkan tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹⁴ Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data yang disusun, dijelaskan, dipresentasikan dan kemudian disimpulkan.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber yang pertama, baik dari individu atau perseorangan.¹⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informasi yang didapat dari perangkat desa (Kepala desa, Sekertaris desa, bendahara desa, BPD)

¹³ *Ibid*, h. 10

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen penelitian* (Jakarta: PT Rineka cipta, Cetakan Kedua, 1993), h. 309.

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum* (Jakarta : Grafika, cetakan ke 3, 2011), h. 105.

¹⁶ Sugianto, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), h.178.

dan masyarakat di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder menurut adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.¹⁷

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara berencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu perhatian.¹⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah aparat desa seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, BPD, kadus dan perangkat desa lainnya dan masyarakat desa Sinar Bandung Kecamatan negeri katon Kabupaten Pesawaran seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan masyarakat lainnya yang berjumlah 665 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁹ Menurut Suharsimi Arikunto apabila

¹⁷Abdurahman Fathoni, *Metodologi penelitian dan Teknik penyusunan skripsi* (Jakarta: Rineka cipta, 2011), h. 40.

¹⁸Sukardi, *Metodologi Penelitian pendidikan kompetensi dan peraktiknya* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h.53.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta cv, cetakan ke 15, 2010), h.

populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, namun apabila populasi penelitian berjumlah dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau lebih. Sesuai dengan penjelasan diatas karena populasinya lebih dari 100 maka diambil 10% dari populasi yang terdapat pada tempat penelitian untuk dijadikan sampel. Jadi 10% dari 665 adalah 66,5 dibulatkan menjadi 66 orang, Pengambilan sampel di lakukan dengan cara *purposive sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak di jadikan sampel.²⁰ Adapun sampel dari penelitian ini ialah 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, 1 orang Bendahara Desa, 2 Orang BPD, 6 aparat desa lainnya dan 55 orang Masyarakat Desa sinar bandung, Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode *Observasi* (pengamatan)

Observasi atau pengamatan adalah proses sistematis yang merekam pola perilaku aktual orang, benda dan peristiwa yang terjadi.²¹ Metode observasi adalah metode pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.²²

²⁰ Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), h.147.

²¹ Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis....*, *Ibid.*, h.187.

²² Irawan soehartono, *Metode penelitian sosial* (Bandung: PT Remaja rosdakarya, cetakan kelima, 2002), h.69.

Observasi ini dilakukan di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).²³ Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan, wawancara ditunjukkan kepada masyarakat desa dan aparat desa Kepala Desa, Bendahara Desa dan Sekertaris Desa, BPD, kadus dan masyarakat di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Metode ini sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga data yang diperoleh akurat.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai kelebihan yang membuat suasana tidak kaku, sehingga dalam mendapatkan data yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kebebasan akan dicapai kewajaran secara maksimal sehingga dapat diperoleh data yang mendalam.

²³*Ibid*, h. 67.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.²⁴

5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, maka langkah berikutnya adalah menghimpun dan mengelola data yang sudah terkumpul tersebut dengan cara mengklarifikasi semua jawaban untuk dianalisa. Data yang diperoleh dilapangan dianalisa dengan menggunakan teknik analisa kualitatif. Analisa kualitatif adalah mengembangkan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk diambil secara kesimpulan.²⁵ Teknik analisa yang digunakan Deskriptif Analisis, yaitu dengan mencari gambaran yang sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Sinar Bandung Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu

²⁴Suharsimi arikunto, *Manajemen penelitian.....*, Ibid, h. 274.

²⁵Irawan soehartono, *Metode penelitian sosial.....*, Ibid, h.87.

dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya.²⁶ Metode analisa data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menyesuaikan dengan kajian penelitian ini yaitu Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Sinar Bandung, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran) yang akan dikaji dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan proses berfikir induktif yaitu proses berfikir untuk menarik semua kesimpulan yang bersifat khusus (individual). Proses induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berfikir induktif merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan.²⁷

²⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 183

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 8



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

1. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan sosial lainnya selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi.

Partisipasi adalah sebagai keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pada tujuan-tujuan kelompok dan sama-sama bertanggung jawab terhadapnya.²⁸

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif dari seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi

²⁸ Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat* (Malaysia: Universitas Sains Malaysia, 2018), h. 109.

secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.²⁹

b. Prinsip-Prinsip Partisipasi

Adapun prinsip-prinsip partisipasi adalah sebagai berikut:

- 1) Cakupan, semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- 2) Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- 3) Transparansi, semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim komunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- 4) Kesetaraan kewenangan (*sharing power/Equal powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- 5) Kesetaraan tanggung jawab (*sharing responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan

²⁹Siti Hajar dkk, *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir* (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018) h.30.

keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.

- 6) Pemberdayaan (*empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi sesuatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- 7) Kerjasama, diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya Manusia.

Adapun Prinsip-prinsip dasar partisipasi masyarakat yang dikembangkan,³⁰ antara lain:

- a) Masyarakat memiliki hak untuk menyatakan pendapat tentang tindakan atau kebijakan yang akan memengaruhi hidup dan kehidupannya.
- b) Partisipasi masyarakat dapat menjadi jaminan bahwa kontribusi masyarakat akan memengaruhi kebijakan.
- c) Proses Partisipasi masyarakat merupakan sarana komunikasi yang dapat mempertemukan kepentingan dari seluruh partisipan.

³⁰ *Ibid*, h.33.

- d) Proses partisipasi masyarakat merupakan sarana untuk mencari jalan keluar dan penyediaan fasilitas terhadap hal-hal yang memiliki potensi pengaruh yang besar.
- e) Proses partisipasi masyarakat dapat menjadi pendorong peningkatan keikutsertaan masyarakat karena melibatkan keikutsertaan dalam merumuskan hal-hal penting dan signifikan yang memengaruhi hidup dan kehidupan masyarakat.
- f) Proses partisipasi masyarakat menyediakan informasi kepada partisipan tentang mengapa masyarakat perlu berpartisipasi secara martabat.
- g) Proses partisipasi masyarakat mengomunikasikan kepada partisipan bagaimana caranya supaya masukan masyarakat dapat memengaruhi kebijakan.

Dari ketujuh prinsip ini dapat dikatakan bahwa partisipasi sangat erat kaitannya dengan pengkomunikasian kepada partisipan mengenai suatu kebijakan dan dengan adanya komunikasi tersebut akan berujung pada kritik, masukan ataupun reaksi tertentu dari masyarakat terhadap kebijakan tersebut.³¹

c. Unsur-unsur Partisipasi

Unsur-unsur yang paling penting di dalam partisipasi³² adalah:

- 1) Bahwa partisipasi/keikutsertaan merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan serta jasmaniah.

³¹ Hendra Karianga, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cetakan Ke-2 2013), h.149.

³² Iwan J. Azis dkk, *Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010), h. 57.

- 2) Adanya kesediaan memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha pencapaian tujuan kelompok. Ini berarti terdapat rasa senang, sukarela membantu kelompok.
- 3) Adanya rasa kesadaran dan tanggung jawab terhadap kelompok.
- 4) Adanya unsur timbal balik, dimana masyarakat mau berpartisipasi apabila ada manfaat bagi masyarakat tersebut.

d. Konsep-konsep Partisipasi

Ada beberapa konsep partisipasi³³ yaitu:

- 1) Partisipasi sebagai kebijakan, yaitu konsep yang memandang partisipasi sebagai prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek pengelolaan keuangan daerah.
- 2) Partisipasi sebagai strategi, konsep ini melihat partisipasi sebagai salah satu strategi untuk mendapat dukungan masyarakat demi kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
- 3) Partisipasi sebagai alat komunikasi bagi pemerintah (sebagai pelayan rakyat) untuk mengetahui keinginan rakyat.
- 4) Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa, konsep yang melihat partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa dan toleransi atas ketidakpercayaan dan kerancuan yang ada dimasyarakat.

Konsep partisipasi masyarakat berkaitan dengan konsep keterbukaan, jadi tanpa keterbukaan pemerintahan maka tidak mungkin masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam kegiatan-

³³*Ibid*, h.155.

kegiatan pemerintahan. Partisipasi merupakan materi yang esensial untuk terjadinya demokrasi, karena demokrasi membutuhkan keterbukaan (*transnparency*), pada akhirnya tujuan partisipasi adalah untuk meningkatkan keteguhan diri (*self-determination*) serta terbangunnya kontrol dan inisiatif masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya untuk pembangunan.³⁴ Jika dicermati, maka partisipasi berbeda-beda menurut mereka yang terlibat, misalnya antara pengambilan kebijakan, pelaksanaan dilapangan dan masyarakat. Ada tujuh karakteristik Tipologi Partisipasi, yang berturut-turut semakin dekat kepada bentuk yang ideal, yaitu:

- 1) Partisipasi Pasif atau manipulatif: Ini merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah. Karakteristiknya adalah masyarakat menerima pemberitahuan apa yang sedang dan telah terjadi.
- 2) Partisipasi Informatif: masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan memengaruhi proses penelitian.
- 3) Partisipasi Konsultatif: Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, menganalisis masalah, dan pemecahannya. Belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama.
- 4) Partisipasi Insentif: Masyarakat memberikan korbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak

³⁴*Ibid*, h. 156.

dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan.

- 5) Partisipasi Fungsional: Masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian dari proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang dispakati.
- 6) Partisipasi Interaktif: Masyarakat berpartisipasi dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan.
- 7) Partisipasi Mandiri: Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung.

Tujuan dasar dari partisipasi masyarakat dapat tercapai adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensi terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya kedalam konsep.³⁵ Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan

³⁵Adi Sasmita Rahardjo, *Membangun Desa partisipatif* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006), h. 50.

menolong pengambilan keputusan (*stake holders*) untuk menentukan prioritas, kepentingan, dan arah yang pasti dari berbagai faktor.³⁶

Di samping itu, Partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan.³⁷

e. Bentuk Partisipasi Masyarakat

Secara sederhana partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok atau masyarakat dalam program pembangunan. Pernyataan ini mengandung arti seseorang, kelompok atau masyarakat senantiasa dapat memberikan kontribusi/sumbangan yang sekiranya mampu untuk menunjang keberhasilan program pembangunan dengan berbagai bentuk atau jenis partisipasi.³⁸

Menurut pendapat Hamijoyo dan Iskandar, memperinci bentuk-bentuk partisipasi sebagai berikut:

- 1) Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam *anjang sono*, pertemuan atau rapat.
- 2) Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
- 3) Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
- 4) Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
- 5) Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan), nyambungan, mulang sambung.

³⁶*Ibid.* h.151.

³⁷Beddy Iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-2 2012), h. 59.

³⁸Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat....*, *Ibid.* h.116.

Menurut Cohen dan Uphoff partisipasi masyarakat terdiri dari empat bentuk yaitu:

- 1) Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*Participation in decision making*).
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan (*Participation in implementation*).
- 3) Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefit*).
- 4) Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*)

Dari bentuk partisipasi warga di atas dapat dijelaskan dalam pembuatan keputusan, bentuk ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan penilaian suatu program atau rencana yang akan ditetapkan.³⁹ Dalam pelaksanaan, bentuk partisipasi masyarakat dilihat dari jumlah/banyaknya yang aktif dalam partisipasi, bentuk-bentuk yang dipartisipasikan, misalnya bahan, uang, tenaga, semuanya atau sebagian-sebagian. Partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi sekali-kali atau berulang-ulang, dalam menerima manfaat, bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari ikut menikmati, pemerataan usaha dan pendapatan atau menggunakan hasil-hasil pembangunan (jalan, jembatan, gedung, air minum dan sebagai sarana dan prasarana sosial).⁴⁰

Dan dalam evaluasi, penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung misalnya dengan memberikan saran-saran, kritik dan protes. Berdasarkan uraian diatas pendapat para ahli, maka bentuk-bentuk partisipasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam perumusan dan keputusan serta partisipasi

³⁹Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa berbasis Partisipasi Masyarakat* (Malang: Setara Pers, 2014), h. 63.

⁴⁰*Ibid*, h.64.

masyarakat dalam mengawasi jalannya suatu pelaksanaan pembangunan supaya mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat.

2. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya.⁴¹ Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan intruksi yang telah dikeluarkan.⁴² Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya.

Penilaian suatu kegiatan dengan melihat apakah mencapai tujuan yang telah disepakati ketika merancang kebijakan adalah pengawasan. Pengawasan pada dasarnya dibutuhkan dalam menghindari kemungkinan adanya penyelewengan atau penyimpangan yang akan terjadi. Dalam penilaian ini atau pengawasan ini dapat

⁴¹Bohari, *Penngawasan Keuangan Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1995), h.3.

⁴²Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), h.131.

dilakukan oleh masyarakat sebagai subjek pembangunan.⁴³ Pengawasan juga dirumuskan sebagai proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Pengawasan tidak mungkin dilakukan tanpa sebuah kegiatan perencanaan dan rencana tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya pengawasan.⁴⁴ Sehingga bisa disimpulkan bahwa pengawasan berkaitan erat dengan perencanaan, dimana kedua hal ini saling mempengaruhi karena:

- 1) Fungsi pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan.
- 2) Pengawasan hanya dapat dilakukan, jika ada perencanaan/rencana.
- 3) Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengawasan dilakukan secara baik.
- 4) Tujuan baru diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengawasan dan pengukuran dilakukan.

Adapun Tujuan dari Pengawasan yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap suatu organisasi dengan tujuan agar organisasi tersebut melaksanakan tugasnya serta fungsinya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Salah satu teknik pengawasan yang lazim dilaksanakan adalah pemeriksaan, yaitu kegiatan untuk menilai apakah

⁴³ Arifin Abdul Rachman, *Indikator Pengawasan* (Bandung: CV Mandar Maju 2001), h.38.

⁴⁴ Hadari Nawawi, *Perencanaan SDM* (Yogyakarta: Gajah Mada University pers 2003), h.40.

hasil pelaksanaan yang sebenarnya telah sesuai dengan yang seharusnya dan untuk mengidentifikasi penyimpangan atau hambatan yang ditemukan.⁴⁵

b. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan antara lain adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pemimpin atau penanggung jawab fungsi atau kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu.⁴⁶

Kegiatan pengawasan⁴⁷ adalah:

- 1) Untuk menjamin kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang diperintah dan mendapat dukungan serta persetujuan rakyat.
- 2) Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang daripada tindakan penyalahgunaan.

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan lainnya, sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk

⁴⁵ Bohari, *Pengawasan Keuangan Negara*, *Ibid*, h.4.

⁴⁶ *Ibid*, h. 5.

⁴⁷ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 23.

memperbaiki dan mencegah pengulangan-pengulangan kegiatan yang salah, untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien, dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang besar.⁴⁸

Tujuan dari pengawasan⁴⁹ adalah sebagai berikut:

- 1) Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruktif dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.
- 2) Agar terselenggaranya tertib administrasi dilingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasaan dalam melaksanakan tugas, fungsi/kegiatan, tumbuhnya budaya maka dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Pengawasan bukan ditujukan untuk mencari-cari kesalahan atau mencari siapa yang salah, tujuan utama dari pengawasan ialah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa datang, dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan

⁴⁸ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Cahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, (Jakarta:Pustaka Yustisia, 2016) h.18.

⁴⁹Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat...., Ibid.* h. 19.

daripada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil maksimal.⁵⁰

c. Teknik Pengawasan

Masyarakat desa pada umumnya terlibat aktif dalam hal pengawasan, seperti sudah menjadi budaya baru di Indonesia dimana masyarakat lebih aktif memberikan kritikan atau masukan kepada pemerintah dibanding turut serta dalam pekerjaan fisik dilapangan. Masyarakat Desa pada umumnya turut memantau kinerja dan hasil serta menikmati secara bersama-sama hasil pembangunannya.⁵¹ Di dalam Pemerintahan desa adanya BPD sebagai lembaga untuk mengawasi setiap jalannya pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.⁵²

Pengawasan yang dilakukan akan memberikan implikasi terhadap pelaksanaan rencana dan dalam melakukan pengawasan memiliki teknik pengawasan supaya dapat berjalan dengan baik.

⁵⁰Bohari, *Penngawasan Keuangan Negara, Ibid*, h.5.

⁵¹Alexander Phuk Tjilen, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Tanggung Jawab sosial perusahaan* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019), h.49.

⁵²Widodo Triputro, *Regulasi Desa* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), h. 77.

Dengan pengawasan yang baik maka pelaksanaan rencana akan baik sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.⁵³ Ada empat kategori dalam mengklarifikasikan pengawasan⁵⁴ adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan melekat adalah serangkaian yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengawasan fungsional, dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.

⁵³ Hasibuan Malayu, *Manajemen sumber Daya Manusia dan Kunci keberhasilan* (Jakarta:PT. Gunung Agung, 1995), h.42.

⁵⁴Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat....*, Ibid. h.23.

- 4) Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan, dapat dilakukan secara langsung yaitu dengan menyampaikan bahan yang diperlukan oleh aparatur pelaksanaan kegiatan tertentu yang menjadi tanggung jawab fungsionalnya, menyampaikan informasi kepada para wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan dan juga dengan memberikan bahan informasi secara faktual dan tanggung jawab.⁵⁵

3. Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Perundang-undangan

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi yang ditransfer melalui APBD Kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan.⁵⁶ Anggaran Dana Desa adalah bagian dari keuangan yang diperoleh dari bagi hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan

⁵⁵ Setyawan Darma Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2004), h.48.

⁵⁶ Rendy Adiwilaga dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta: CV. Budi utama, 2018), h.189.

desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Keberhasilan pembangunan nasional dan pembangunan desa pada khususnya tidak saja ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, seperti dalam pengawasan adanya lembaga BPD yaitu Badan Permusyawaratan Desa, BPD memiliki fungsi dan hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa seperti yang terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa.⁵⁷ Selain dari fungsi BPD juga memiliki hak yang terdapat dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa⁵⁸ yaitu:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintah desa kepada pemerintah desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Masyarakat juga termasuk dalam konteks pengawasan dalam pengelolaan dana desa, seperti yang terdapat dalam Pasal 68 ayat 1 huruf

⁵⁷Pasal 55 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵⁸Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

(a) UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁵⁹ Dan dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dana Desa juga menyebutkan bahwa Pengawasan terhadap ADD beserta pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah dan dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pengawasan desa dilaksanakan tidak lain untuk menghindari adanya kecurangan dari pemerintah desa itu sendiri.⁶⁰

Masyarakat adalah unsur yang paling penting dalam berpartisipasi dan mengawasi pengelolaan dana desa, karena merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari perogram pembanguna maupun pengembangan masyarakat pedesaan, dalam Pasal 68 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁶¹ Dan pada Pasal 68 ayat 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan tentang kewajiban

⁵⁹Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68.

⁶⁰Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dana Desa.

⁶¹Pasal 68 Ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan di desa.⁶² Maka dalam partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap perogram pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat.

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa di atas, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta keterangan, seperti dalam pengelolaan Dana Desa, dalam setiap pengelolaanya harus adanya pengawasan/pemantauan seperti dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat (4) Peraturan menteri, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala.⁶³ Dalam Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dana Desa menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan Pertanggungjawaban penggunaan ADD setiap akhir tahun kepada masyarakat melalui BPD.⁶⁴

⁶²Pasal 68 Ayat 2 huruf (e) Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁶³ Pasal 16 Ayat 4 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

⁶⁴ Pasal 16 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Alokasi Dana.

Ada enam hal pokok yang perlu kita kembangkan bila ingin memperoleh partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun keenam hal tersebut adalah kesadaran, minat, kreatifitas, merencanakan atau menyusun dan melaksanakan. Apabila keenam hal tersebut dimiliki oleh masyarakat maka hal lain yang perlu diperhatikan adalah aspek kepemimpinan yang diterapkan oleh pemerintah desa didalam melakukan pembangunan di wilayahnya.

d. Partisipasi dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dalam Fiqh Siyasah

a. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan sipembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan, dengan kata lain istilah *fiqh* menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.⁶⁵ Secara terminologis (istilah) menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshil* (terperinci yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah).⁶⁶

Siyasah menurut bahasa adalah mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politiknya, artinya

⁶⁵Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah...*, *Ibid*, h.21.

⁶⁶*Ibid*, h. 22.

mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah. secara terminologis adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.⁶⁷ *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁶⁸

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan bertanggung jawabkan kekuasaannya.⁶⁹

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, Ruang lingkup *fiqh siyasah* yang terdapat 8 bidang⁷⁰ ialah sebagai berikut: Siyasah

⁶⁷*Ibid*, h.23.

⁶⁸Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasa....*, *Ibid*, h. 4.

⁶⁹Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah....*, *Ibid*, h. 6.

⁷⁰Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group, cetakan Ke-3 2007), h.30.

Dusturriyah, Siyasah Tasri'iyahyah, Siyasah Qdha'iyah, Siyasah Maliyah, Siyasah Idariyah, Siyasah Dauliyah, Siyasah Tanfiziyyah, Siyasah Harbiyah.

1) Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara. *Siyasah dusturiyah* ialah hubungan antara pemimpin di suatu tempat atau wilayah dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu biasanya dibatasi hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁷¹

2) Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *Fiqh siyasah dusturiyah* pada umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: *pertama* dalil-dalil kulliy yang berisikan ayat-ayat al-qur'an maupun hadist, maqashid al-shari'ah, dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil

⁷¹ Fiqh Siyasah Dusturiyah (On-Line), tersedia di: <http://khoirulsidikderschone.blogspot.com> (10 Januari 2020).

kulliy tersebut menjadikan didalam mengubah masyarakat dan menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. *Kedua* aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama yakni yang disebut dengan fiqh.

Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa inggris, atau Undang-undang Dasar dalam bahasa indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dusturiyah, sedangkan penggunaan istilah *fiqh Dusturiyyah*, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam dusturiyah itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu Negara, dusturiyah dalam suatu Negara, dusturiyah dalam suatu negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dusturiyah tersebut. Dusturiyah dalam konteks keindonesiaan adalah undang-undang dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan pembentukan peraturan perundang-undangan indonesia.

Sumber fiqh dusturiyah pertama adalah al-qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-qur'an

kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rosululloh SAW didalam menerapkan hukum di negeri arab.⁷² Ketiga adalah kebijakan-kebijakan *khulafa al-rasyidin* didalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahan yang sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.

Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama, didalam masalah *fiqh dusturiyah* hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyah*. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Sumber kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-quran dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini biasanya diterapkan oleh negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundangan-undangan tidaklah merujuk pada al-qur'an dan hadis melainkan melihat dari

⁷² Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasah...., Ibid*, h. 53.

kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidak menyangkut agama, suku dan budaya.

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan sama halnya dengan undang-undang dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut abdul khallaf wahab dalam bukunya yang berjudul *al-siyasah al-syar'iyah*, prinsip-prinsip yang diletakan islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi social, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah perundang-undangan di suatu negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya.

Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok dan objek kajian undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pembentukan sejarah Negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Materi dalam konstitusi itu harus sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut,

karena itu merupakan cita-cita masyarakat yang ditampung dan harus diwujudkan bersama melalui penguasa.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:

- a) Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlul halli wa aqdi*, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin didalam suatu negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
 - b) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah wizarah, waliy al-ahadi* dan lain-lain.
 - c) Bidang *siyasah qadlaiyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
 - d) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.
- 3) Dasar hukum Siyasah Dusturiyah
1. Alqur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam allah yang berisi firman-firman allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena Al-qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi sebagai macam

superstruktur islam.⁷³ Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

2. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu peraktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma prilaku diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi.

3. *Ijma* (consensus)

Dalam hukum Islam *ijma* merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma* tersebut dinyatakan batal. Adapun dalil-dalil al-Qur'an yang menerangkan tentang *ijma* yakni:

⁷³ Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, Cetakan ke II 2018), h. 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

4. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negative antara bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.⁷⁴ Metode *Qiyas* ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas pada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil al-qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

⁷⁴ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 56.

c. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dalam *Fiqh Siyasah*

Konsep pelaksanaan pengelolaan dana desa dalam fiqh siyasah bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pengelolaan dana desa seperti dalam pembanguna lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pengelolaan dalam fiqh siyasah lebih dari itu. Fiqh siyasah pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan umat. Oleh karenanya, konsep partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dalam fiqh siyasah dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.⁷⁵ Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan *fiqh siyasah* tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan fiqh siyasah terhadap pembangunan. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut *fiqh siyasah* yaitu:

- a. Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.

⁷⁵ Ibnu Syarif, Mugar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 31.

- b. Rububyyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.
- c. Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan fiqh siyasah dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.
- d. Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pelaksanaan pengelolaan dana desa menurut fiqh siyasah mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga diakhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar

dan diwujudkan dalam konsep pelaksanaan pengelolaan dana desa yang bernafaskan fiqh siyasah.

Pelaksanaan Pengelolaan dana desa yang bernafaskan fiqh siyasah; tidak lepas dari suatu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip perekonomian Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan kehendak untuk mengurangi konsumsi pribadi, mengurangi simpanan dan tabungan pribadi, serta menambah pengeluaran di jalan Allah. Dengan demikian, sebenarnya sendi-sendi ekonomi Islam adalah tauhid dan persaudaraan.

Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah Swt. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus khalifatullah fil ardh (wakil Allah di muka bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi. Kedua tugas ini akan berjalan baik dan sukses sangat tergantung pada jalan yang dipilihnya. Pilihan atas jalan tersebut mempengaruhi arah dari pembangunan. Allah telah memberikan dua potensi pada diri manusia dalam menentukan arah kehidupan, yaitu potensi kebaikan (al-taqwa) dan potensi keburukan (al-fujur).

Adapun tazkiyah merupakan upaya untuk mentransformasikan kehidupan ke arah yang lebih baik dan berkah. Kerangka tazkiyah

didasari pada tiga prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan dan ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT. Konsep tazkiyah mendorong bahwa fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik material semata, melainkan juga dikaitkan dengan aspek moral spiritual. Ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya didasarkan pada ukuran-ukuran material, namun juga ditentukan oleh kualitas moral pelaku pembangunan.

Kualitas SDM pelaku pembangunan pun sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu Negara. Karena itu pembangunan SDM sangat diperlukan, apalagi esensi kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Di sinilah letak fungsi dan peran negara, di mana pemerintah sebagai “manajer dan pelayan” pembangunan harus mampu memetakan semua potensi SDM dan sumber daya alam (SDA) untuk dikelola dengan maksimal, guna menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat dalam rentang waktu dunia dan akhirat.

Jika memacu pembangunan ekonomi saja, maka akan tercerabutnya nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan, akan lahir pelaku pembangunan yang korup, pembisnis yang kotor dan masyarakat yang materialistik. Semua sisi kehidupan dinilai dengan uang. Uang menjadi alat ukur kesejahteraan.

Kekeliruan-kekeliruan premis konvensional dalam teori pembangunan menjadi akar masalah timbulnya paradoks antara

pertumbuhan dan distribusi ekonomi. Kehadiran ekonomi Islam meminimalisasi paradoks yang diakibatkan konvensional dengan mengubah paradigma konflik antara pertumbuhan dengan distribusi, melalui penciptaan berbagai instrument dan mekanisme yang bisa menjamin tumbuhnya ekonomi di satu sisi, dan terciptanya distribusi di sisi lain. Konsepsi ini tercermin dalam kesatuan arah pembangunan Islam melalui tiga sektor yaitu produktivitas sektor riil, keuangan syaria'ah, dan kesejahteraan yang terefleksi pada zakat, infak, sedakah dan wakaf (Ziswaf).

d. Pembangunan dalam Islam

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan. Pemikiran pembangunan menurut paradigma Islam diantaranya berasal dari ibn Khaldun dan Syah Wali Allah, dua tokoh Islam yang hidup pada priode waktu yang berbeda, Islam menunjukan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan maupun warna kulit. Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Allah dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingannya. Oleh karena itu, agar pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan bangsa (*nation building*) seperti yang telah dikemukakan di atas juga sudah dibicarakan didalam potongan Alqur'an dijelaskan surat *Ar-Ra'd* ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
 اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا
 فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Dan ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi.⁷⁶ Karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

⁷⁶ Wibawa, Samudra,., *Administrasi Negara; Isu-isu Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal.7

1. “Pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (studi di desa Mekar sari kecamatan Palangga kabupaten Konawe selatan)” Oleh: Eti Elin Rostuti.⁷⁷

Hasil penelitian: Pemerintah Desa Mekar sari menunjukkan keaktifannya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan tahapan pengelolaan keuangan desa melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan untuk pembangunan desa. Dengan tahapan atau proses tersebut masyarakat memiliki inisiatif tinggi dan terdorong untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan di desa Mekar Sari seperti ikut terlibat langsung dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan, serta masyarakat ikut terlibat dalam menikmati hasil pembangunan.

2. “Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Suka Maju Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016)”, Oleh: Oktavian Firnando.⁷⁸

Hasil Penelitian: Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan ADD Desa Suka Maju dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu Voice (Suara/aspirasi), Access (akses), Control (kontrol/pengawasan). Dari segi suara/aspirasi pemerintah desa telah memberikan kesempatan masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya, dan pemerintah desa beranggapan bahwa

⁷⁷ Eti Elin Rostuti, “pengelolaan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (studi di desa Mekar Sari Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe selatan)”. (Skripsi Universitas Halu oleo Kendari, 2018).

⁷⁸ Oktavian Firnando, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi di Suka Maju Kecamatan Miestong Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016)”. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2017).

aspirasi masyarakat sangat utama sebagai pedoman ADD, tetapi berbeda dengan tanggapan masyarakat bahwa aspirasi masyarakat jarang digunakan. Pemerintah desa telah memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki akses dalam kegiatan pengelolaan ADD, tetapi ruang yang di berikan pemerintah sangat terbatas. Pemerintah desa hanya memberikan kesempatan masyarakat untuk terlibat dalam proses perkembangan pembangunan di desa, masyarakat hanya menerima kebijakan apa yang telah diputuskan oleh pemerintah desa, faktor yang mempengaruhi yaitu pekerjaan, penghasilan dan pendidikan, usia, jenis kelamin dan lamanya tinggal.

3. “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)” Oleh: Wahyuddin.⁷⁹
 Hasil Penelitian: partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tanah Karaeng tergolong tinggi, faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Tanah Karaeng adalah faktor internal yang meliputi (Kesadaran, kemauan, pendidikan, pendapatan/penghasilan). Faktor eksternal yang meliputi (Pemerintah desa dan fasilitas yang rendah).

Dari ketiga judul diatas kita dapat melihat beberapa persamaan topik dan subjek penelitian yang sama yaitu tentang Partisipasi Masyarakat, kesamaan dari faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Masyarakat seperti faktor pendidikan, usia, jenis kelamin dan lain-lain. Sama-sama bertujuan untuk mengontrol/mengawasi penguasanya dalam setiap

⁷⁹Wahyuddin, “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan desa (Studi di Desa Tanah Karaeng Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)”. (Skripsi Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar 2018).

pembangunan dan sama-sama mengacu Pada Peraturan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014.

Adapun perbedaan dari ketiga judul penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Fiqh Siyasah, *pertama* judul penelitian sebelumnya lebih bersifat umum dan menyeluruh sedangkan judul penelitian ini lebih spesifik yaitu Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasannya terhadap Pengelolaan Dana Desa, *kedua* judul penelitian ini bersifat khusus sebab didasari perspektif Fiqh Siyasah.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Adiwilaga Rendy dkk, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: CV. Budi utama, 2018.
- Asyiah Nur. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: CV budi Utama, 2012.
- Ali zainudin. *Metode penelitian Hukum*. Jakarta : Grafika, cetakan ke 3,2011.
- Ahmadi Abu. *Ilmu sosial dasar*. Jakarta: PT. Rineka cipta, cetakan kelima, 2009.
- Arif Muhammad. *Tata cara Pengelolaan keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: Red Post Press, 2007.
- Bohari. *Penngawasan Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1995.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenada Media Group, cetakan Ke-3 2007.
- Fathoni Abdurahman. *Metodologi penelitian dan Teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: Rineka cipta, 2011.
- Hadikusuma Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum adat Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju, 1992.
- Huraerah Abu. *Pengorganisasian dan Pengembangan masyarakat malaysia*: Universitas Sains Malaysia, 2018.
- Hajar Siti dkk. *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018.
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Jindan Ibrahim Khalid. *Teori politik Islam; Telaah Kritis ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Kunto Ari Suharsimi. *Manajemen penelitian*. Jakarta: PT Rineka cipta, Cetakan Kedua,1993.
- Karianga Hendra. *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Prenadamedia Group, cetakan Ke-2 2013.

- Kunto Ari Suharsimi. *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014
- Malayu Hasibuan. *Manajemen sumber Daya Manusia dan Kunci keberhasilan*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1995.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan terhadap perbuatan aparat dan PTUN di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty 2007.
- Maksudi Beddy Iriawan. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-2 2012.
- Nawawi Hadari. *Perencanaan SDM*. Yogyakarta: Gajah Mada University pers 2003.
- Nurcholis. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Pulungan Suyuti. *Fiqh Siyasah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Pramukti Sigit Angger dan Cahyaningsih Meylani. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2016.
- Prayitno Gunawan , Subagyo Aris. *Membangun Desa*. Malang: UB Press, 2018.
- Rachman Abdul Arifin. *Indikator Pengawasan*. Bandung: CV Mandar Maju 2001.
- Rahardjo Adi Sasmita. *Membangun Desa partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Situmorang M. Victor dan Juhir Jusuf. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Soehartono Irawan. *Metode penelitian sosial*. Bandung: PT Remaja rosdakarya, cetakan kelima, 2002.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian pendidikan kompetensi dan peraktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Salam Darma Setyawan. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2004.

Sumaryadi, I Nyoman. *Perencanaan Pembangunan Daerah otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama, 2005.

Siroj Aqil Said. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta cv, cetakan ke 15, 2010.

Sarman, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka cipta, 2011.

Solekhan Moch. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Pers, 2014.

Sugiarto. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017.

Sholihin Bunyana. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, Cetakan ke II 2018.

Tjandra Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.

Ubaedillah. *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Yustisia Visi. *pedoman resmi petunjuk pelaksanaan Dana Desa*. Jakarta: PT. visimedia Pustaka, 2016.

Zuhraini. *Hukum pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2016.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 75.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 03 tentang pengelolaan keuangan desa.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 55.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 61.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 68.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 Ayat 1 huruf (c).

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 Ayat 2 huruf (e).

3. Wawancara

Kuswanto, wawancara dengan penulis, Balai Desa, Desa Sinar Bandung, 17 Februari 2020.

Mujib Syahroni, Wawancara dengan penulis, Balai Desa, Desa Sinar Bandung, 17 Februari 2020.

Nanang harmuji, wawancara dengan penulis, Balai Desa, Desa Sinar Bandung, 18 Februari 2020.

Hasan Basri, wawancara dengan penulis, Balai Desa, Desa Sinar Bandung, 17 Februari 2020.

Rukman, Wawancara dengan penulis, Balai Desa, Desa Sinar Bandung, 18 Februari 2020.

Misro, Wawancara dengan penulis, rumah bapak misro, Desa Sinar Bandung, 19 Februari 2020.

Cecep suntika , Wawancara dengan penulis, Balai Desa, Sinar Bandung, 18 Februari 2020

Elan saputra, Wawancara dengan penulis, Rumah bapak Elan saputra, Desa Sinar Bandung, 19 Februari 2020.

Odih, Wawancara dengan penulis, Rumah bapak Odih, Desa Sinar Bandung 19 Februari 2020.

Ridwan, Wawancara dengan penulis, Rumah bapak Ridwan, Desa Sinar Bandung, 8 Maret 2020.

Atang, Wawancara dengan penulis, Rumah bapak Atang, Desa Sinar Bandung, 8 Maret 2020.

Yanto, Wawancar dengan penulis, Rumah bapak Yanto, Desa Sinar Bandung 8 Maret 2020.

Wahyulloh, Wawancara dengan penulis, Rumah bapak wahyulloh, Desa Sinar Bandung 8 Maret 2020.

Juha, Wawancara dengan penulis, Rumah bapak Juha, Desa Sinar Bandung 8 Maret 2020.

Mae, Wawancara dengan Penulis, Rumah ibu mae, Desa Sinar Bandung 9 Maret 2020

Herman, Wawancara dengan Penulis, Rumah bapak Herman, Desa Sinar Bandung 9 Maret 2020.

Solihin, wawancara dengan penulis, Balai Desa, Desa Sinar bandung, 17 Februari 2020.

Eis, wawancara dengan penulis, Rumah ibu eis, Desa Sinar bandung, 9 Maret 2020.

Isah, Wawancara dengan penulis, Rumah ibu isah, Desa Sinar Bandung, 9 Maret 2020.

Sipa, Wawancara dengan penulis, Rumah ibu sipa, Desa Sinar Bandung, 9 Maret 2020.

4. Online

Fiqh Siyasah Dusturiyah (On-Line), tersedia di:
<http://khorulsidikderschone.blogspot.com> (10 Januari 2020)